

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar



Disusun Oleh:

Yofa Aldila Dellas Meidianti

1910201015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

MAGELANG

2023

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN
PENGEMIS DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar



Disusun Oleh:

Yofa Aldila Dellas Meidianti

1910201015

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS TIDAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

MAGELANG

2023

ABSTRAK

Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Pemalang

Yofa Aldila Dellas Meidianti (1910201015)

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar**

Gelandangan dan pengemis memang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya menjadi masalah sosial baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Penyebab utama adanya gelandangan dan pengemis yakni kemiskinan. Selain itu, urbanisasi juga menjadi faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis karena adanya ketimpangan pembangunan desa dengan kota. Di Indonesia gelandangan dan pengemis masih sering dijumpai di jalan maupun di berbagai tempat umum lainnya. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pemalang setiap tahunnya jumlah gelandangan dan pengemis mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh saat pra penelitian sejak tahun 2020 hingga 2022 jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia bertambah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan dilandasi oleh teori peran dari Jim Ife yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional, dan peran teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Pemalang telah melaksanakan peran-peran berdasarkan teori peran dari Jim Ife. Setiap peran yang dilakukan terbagi menjadi dua sub aspek yaitu pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial. Pertama, Dinas Sosial Kabupaten Pemalang aktif dalam memfasilitasi dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Kedua, dalam pemberian edukasi dilakukan dengan cara pemberian bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan kerja. Ketiga, Dinas Sosial menjalin relasi dengan berbagai pihak lain yang mempunyai tugas yang bersesuaian dengan penanganan gelandangan dan pengemis. Dan keempat, sebagai peran teknis Dinas Sosial Kabupaten Pemalang melakukan teknis atau tahapan pelayanan dan rehabilitasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Kata Kunci : Peran, Penanganan gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial

ABSTRACT

The Role of the Social Service in Handling Homeless and Beggars in Pemalang Regency

Yofa Aldila Dellas Meidianti (1910201015)

**Department of State Administration, Faculty of Social and Political Sciences,
Tidar University**

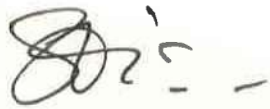
Homelessness and begging are familiar in everyday life. Both are social problems in both urban and rural areas. The main cause of homelessness and begging is poverty. In addition, urbanization is also a factor in the emergence of vagrants and beggars because of the imbalance between rural and urban development. In Indonesia, homeless people and beggars are still often found on the streets and in various other public places. As happened in Pemalang Regency, the number of homeless people and beggars has increased every year. Based on data obtained during pre-research from 2020 to 2022, the number of vagrants and beggars caught in raids has increased. This research was conducted to find out the role played by the Social Service. This research was conducted using qualitative research methods and was based on Jim Ife's role theory, namely facilitative role, educational role, representational role, and technical role. The results showed that the Pemalang Regency Social Service had carried out roles based on Jim Ife's role theory. Each role performed is divided into two sub-aspects, namely social services and social rehabilitation. First, the Pemalang Regency Social Service is active in facilitating the handling of vagrants and beggars. Second, the provision of education is carried out by providing physical, mental, social and work skills guidance. Third, the Social Service establishes relationships with various other parties who have tasks that are in line with the handling of vagrants and beggars. And fourth, as a technical role, the Pemalang Regency Social Service performs technical or service and rehabilitation stages in accordance with the existing Standard Operating Procedures (SOP).

Keywords: Role, Handling of vagrants and beggars, Social Service

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Pematang
Nama : Yofa Aldila Deltas Meidianti
NPM : 1910201015
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Skripsi ini disetujui : 31 Mei 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si
NIP. 196206141987032001

Pembimbing II



Yuni Kurniasih, M.Si
NIP. 199306182019032023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar



Dr. Sri Mulyani, M.Si
NIPPPK. 196206012021212001

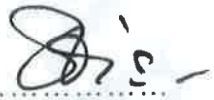


HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis
di Kabupaten Pemalang
Ditulis Oleh:

Yofa Aldila Dellas Meidianti

NPM: 1910201015

Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si.	
NIP	196206141987032001	
Sekretaris Penguji	Yuni Kuniarsih, M.Si	
NIP	199306182019032023	
Anggota Penguji	Dr.Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si	
NIPPPK	196709282021212002	

Magelang, 6 Juni 2023

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si

NIP.1962061411987032001

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Sri Mulyani, M.Si

NIPPPK.196206012021212001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yofa Aldila Dellas Meidianti

NPM : 1910201015

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Magelang, 6 Juni 2023



Yofa Aldila Dellas Meidianti

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya (QS. Al-Baqarah: 286)

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak (Ralph Waldo Emerson)

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ♥ Allah Subhanahu wa ta'ala
- ♥ Alm. Bapak Bambang Suprayogi dan Ibu Farida
- ♥ Orang-orang tersayang
- ♥ Almamater Kebanggaan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Pemalang”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tidar . Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada skripsi ini, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan.

Dalam proses skripsi ini, penulis telah mendapat pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini, baik bantuan moril, materi, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati. pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Allah SWT yang telah memberikan ridha dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.Sugiyarto, M.Si. selaku rektor Universitas Tidar.
3. Ibu Prof.Dr. Sri Suwitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai pembimbing I saya.
4. Ibu Yuni Kuniarsih, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga tersusunnya Skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak/Ibu staf dan jajarannya yang ada di Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar yang telah ikut serta membantu selama masa perkuliahan.

7. Ibu Nina Min Lusiyanti selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial di Di Dinas Sosial Kabupaten Pematang yang telah memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian Skripsi Di Dinas Sosial Kabupaten Pematang.
8. Kedua orang tuaku Alm. Bapak Bambang Suprayogi dan Ibu Farida yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan perjuangan yang tak kenal lelah untukku.
9. Mahasiswa Universitas Tidar dengan NPM 1910201071 yang telah menemani dengan penuh cinta dari semester 2 hingga saat ini.
10. Teman-temanku “Geng Cailah” Anisa Noviliyani, Winna Kurniasari, Putri Nurazizah, dan Mar’atus Sholehah yang selalu menemaniku dari awal kuliah, yang menjadi sobat gabut disegala situasi.
11. Almamaterku tercinta Universitas Tidar yang telah memberikanku pengalaman yang tak terlupakan.

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

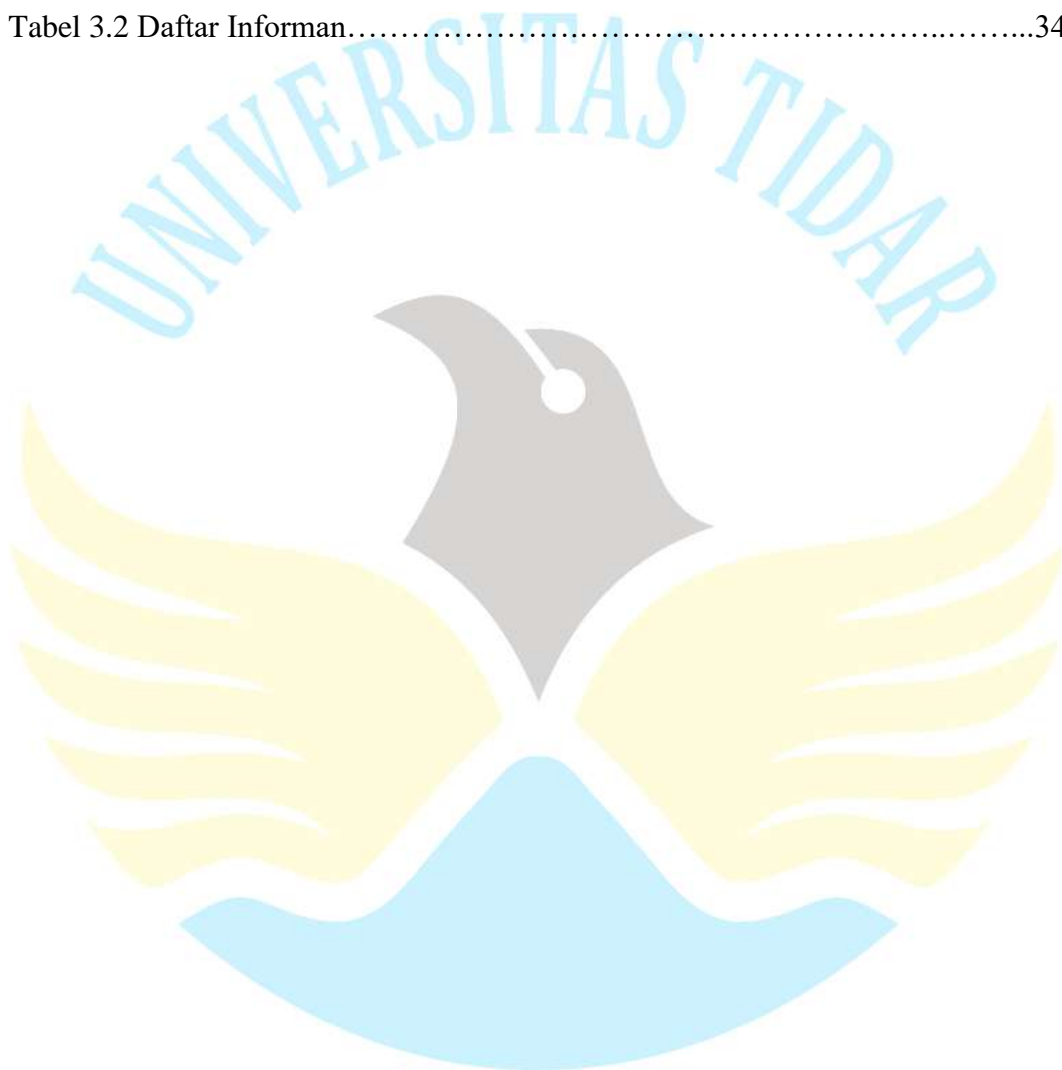
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Administrasi Publik	9
2.2 Manajemen Publik	13

2.3 Teori Peran	17
2.3.1 Teori Peran Jim Ife.....	18
2.3.2 Teori Peran Soerjono Soekanto.....	20
2.4 Gelandangan dan Pengemis	23
2.5 Hasil Penelitian Yang Relevan	26
2.6 Kerangka Berpikir.....	29
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan	30
3.2 Lokasi Penelitian.....	30
3.3 Sasaran Penelitian	31
3.4 Fokus Kajian	31
3.5 Sumber Data.....	32
3.6 Teknik Pemilihan Informan	33
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.8 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum.....	40
4.1.1 Dinas Sosial Kabupaten Pematang	40

4.1.2 Potret gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang.....	41
4.2 Hasil Penelitian	42
4.2.1 Peran Fasilitatif	42
4.2.2 Peran Edukasi.....	47
4.2.3 Peran Representasional	51
4.2.4 Peran Teknis.....	55
4.3 Pembahasan.....	58
4.3.1 Peran Fasilitatif	58
4.3.2 Peran Edukasi.....	62
4.3.3 Peran Representasional	66
4.3.4 Peran Teknis.....	70
BAB V.....	78
KESIMPULAN.....	78
5.1 Penarikan Kesimpulan	78
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Pemalang.....	4
Tabel 2.1 Hasil Penelitian yang Relevan.....	26
Tabel 3.1 Fokus Kajian.....	32
Tabel 3.2 Daftar Informan.....	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 4.1 Rumah Singgah.....	59
Gambar 4.2 Pelayanan Kesehatan.....	60
Gambar 4.3 Pelatihan pembuatan sarung goyor.....	63
Gambar 4.4 Pelatihan membuat donat.....	63
Gambar 4.5 Bimbingan rohani.....	65
Gambar 4.6 Bimbingan sosial.....	65
Gambar 4.7 Razia Gelandangan dan Pengemis.....	68
Gambar 4.8 Teknis Pelayanan.....	71



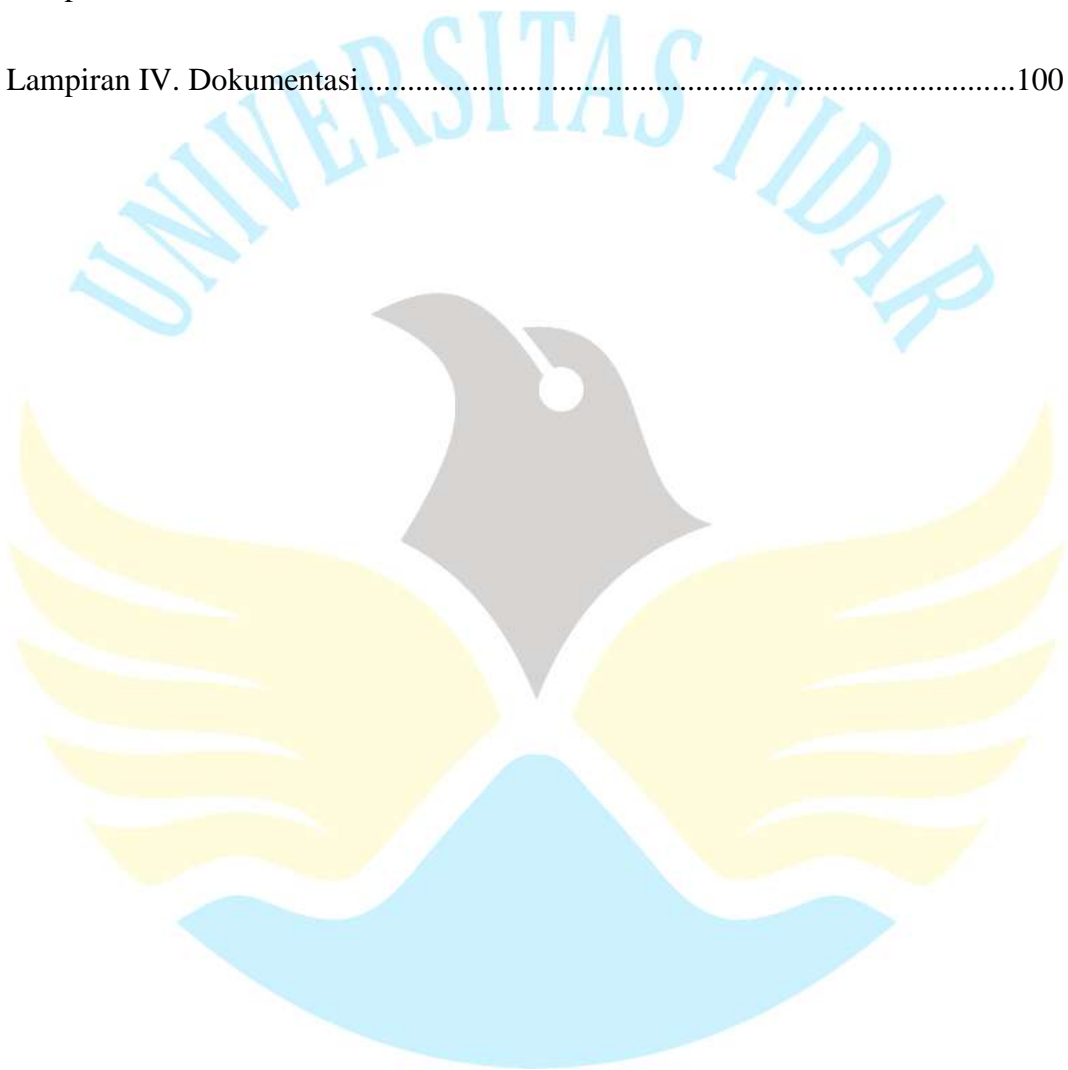
DAFTAR BAGAN

Bagan 2.5 Kerangka Berpikir.....	29
----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

LampiranI. Matriks Penelitian.....	84
LampiranII. Surat Penelitian.....	88
Lampiran III. Kondensasi Data.....	89
Lampiran IV. Dokumentasi.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia dengan 273.523.615 jiwa yang tersebar di seluruh pulau dilansir dari Detik.com (diakses 18 Desember 2022). Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, namun terdapat ketidakmerataan dalam hal persebaran penduduk tentu menjadi permasalahan yang harus ditemukan solusi perbaikannya. Berpredikat sebagai negara berkembang juga menjadi tantangan bagi negara ini, dikarenakan terdapat dorongan untuk pertumbuhan di segala sektor yang menunjang perkembangan negara tak terkecuali pada pertumbuhan di sektor perekonomian. Namun, didalam proses pertumbuhan ekonomi itu sendiri masih memiliki berbagai masalah yang dihadapi, salah satunya masalah kesejahteraan sosial.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan di Indonesia masih tergolong rendah, karena masih banyak keluarga-keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan. Permasalahan kesejahteraan sosial menurut Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 jenis masalah yang digolongkan menjadi lima kelompok besar, yaitu

keterlantaran, kecacatan, kemiskinan, ketunasosialan, dan korban bencana. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, pemerintah berpedoman pada Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara, termasuk fakir miskin dan anak terlantar, dipelihara oleh negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun mengingat masalah kesejahteraan sosial di Indonesia sangat kompleks, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial seringkali tidak tuntas dan tidak terpadu. Akibat penanganan masalah kesejahteraan sosial yang tidak tuntas dan tidak terpadu, sehingga menyebabkan masalah kesejahteraan sosial justru semakin kompleks. Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang masih tinggi dan menimbulkan dampak negatif adalah masalah gelandangan dan pengemis.

Gelandangan dan pengemis memang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya menjadi masalah sosial baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Pengemis, gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Penyebab utama adanya gelandangan dan pengemis yakni kemiskinan. Selain itu, urbanisasi juga menjadi faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis karena adanya ketimpangan

pembangunan desa dengan kota. Hal ini berawal dari masyarakat desa yang bertujuan untuk mengadu nasib di kota untuk meningkatkan taraf hidupnya. Akan tetapi, dengan minimnya kualitas Sumber Daya Manusia serta dengan semakin sedikit lapangan pekerjaan yang ada, sehingga mereka menjadi pengangguran dan menjadikan pengemis sebagai pekerjaan mereka sehari-hari. Di Indonesia gelandangan dan pengemis masih sering dijumpai di jalan maupun di berbagai tempat umum lainnya. Dilansir dari Sindonews.com (diakses 18 Desember 2022) Indonesia merupakan negara nomor lima dengan jumlah gelandangan dan pengemis terbanyak di Dunia sebanyak 77.500 jiwa pada tahun 2019.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Pemalang setiap tahunnya jumlah gelandangan dan pengemis mengalami peningkatan. Terkait hal ini, pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan sosial tersebut yaitu Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2017 berisi tentang penertiban tuna sosial di Kabupaten Pemalang. Dalam Peraturan Bupati tersebut Dinas Sosial Kabupaten Pemalang mendapat tugas untuk merumuskan kebijakan, pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi yang dapat memberdayakan kaum lemah dan terpinggirkan ini. Namun pada kenyataannya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang jumlahnya semakin hari semakin bertambah bahkan pada beberapa orang menjadikan pengemis sebagai profesi untuk memenuhi hidupnya. Mengenai masalah adanya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kehadiran gelandangan dan pengemis tidak dapat dipastikan berapa banyak jumlahnya, karena Dinas Sosial Kabupaten Pemalang tidak memiliki data yang

valid. Selama ini data yang di peroleh dari Dinas Sosial Kabupaten Pemalang hanya data berupa pembinaan atau penertiban. Dalam masalah tersebut peran Dinas Sosial Kabupaten Pemalang dalam penanganan gelandangan dan pengemis ini masih terbilang belum maksimal. Berikut adalah jumlah gelandangan dan pengemis yang berhasil terdata oleh Dinas Sosial

Tabel 1.1 Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Pemalang

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	87
2.	2021	105
3.	2022	134

(Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Pemalang)

Berdasarkan data jumlah gelandangan dan pengemis yang berhasil terjaring razia oleh petugas Dinas Sosial mengalami peningkatan. Dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2022 jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang bertambah. Namun, data tersebut belum semua gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang terdata karena pada saat adanya penjaringan masih banyak gelandangan dan pengemis yang belum tertangkap. Ada beberapa gelandangan dan pengemis yang bersembunyi pada saat ada razia dilaksanakan, setelah razia selesai para gelandangan dan pengemis mulai beraksi kembali di tempat umum maupun di jalanan.

Maraknya gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang seperti yang dilansir dari Detikgo.com (diakses pada 13 Oktober 2022), keberadaan para gelandangan, pengemis serta pengamen di perempatan lampu merah Sirandu Pemalang akhir-akhir ini membuat resah para pengguna jalan yang melintas diperempatan lampu merah tersebut. Hal ini dikarenakan kegiatan mereka yang mengganggu aktifitas lalu lintas tak jarang pula mereka sering memaksa meminta uang para pengguna jalan yang melintas. Selain itu, di lampu merah Gandulan Exit Toll Pemalang, lampu merah Pasar Pagi Pemalang, lampu merah Widuri, alun-alun Pemalang, lampu merah Beji, lampu merah Pasar Petarukan dan tempat umum lainnya masih dapat terlihat beberapa anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran untuk meminta uang dari pengguna jalan yang melintas. Bukan hanya jumlah gelandangan dan pengemis yang bertambah, namun juga bagaimana cara mereka meminta-minta di jalan. Modus yang digunakan sekarang beraneka ragam, dengan cara meminta uang dengan jasa membersihkan kaca kendaraan. Pengemis yang menggunakan anak sebagai alat untuk menarik iba dari pengguna jalan.

Mengingat permasalahan gelandangan dan pengemis yang cukup kompleks, maka permasalahan ini membutuhkan peran dari berbagai pihak termasuk pihak swasta dan masyarakat umum. Dalam hal ini peran Dinas Sosial juga memiliki andil yang cukup besar dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis. Dinas Sosial Kabupaten Pemalang sudah melakukan program pengentasan masalah gelandangan dan pengemis, akan tetapi jumlah gelandangan dan pengemis belum berkurang justru semakin bertambah. Adanya rumah singgah

bagi pengemis dan gelandangan juga merupakan salah satu penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pemalang.

Rumah singgah PGOT sudah dioperasikan sejak tahun 2011, dalam pelaksanaannya rumah singgah tersebut memiliki program rehabilitasi salah satunya yaitu rehabilitasi karya. Rehabilitasi karya adalah bagian rehabilitasi sosial yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengupayakan agar sasaran penanganan dapat menjadi manusia produktif sehingga mampu menolong dirinya sendiri dan berpartisipasi dalam pembangunan. Program rehabilitasi karya yang terdapat di rumah singgah Karya Mandiri yaitu pelatihan pertukangan, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan, dan perikanan. Namun rumah singgah tersebut belum maksimal dalam menangani gelandangan dan pengemis. Dalam penertiban gelandangan dan pengemis Dinas Sosial Kabupaten Pemalang berkerjasama dengan Satpol PP untuk melakukan razia terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis dengan harapan memberikan kesadaran bagi mereka, tetapi setelah dilakukan penjaringan dan pembinaan awal dari Dinas Sosial Kabupaten Pemalang masih banyak gelandangan dan pengemis yang kembali ke jalan raya dan melakukan aktivitas meminta-minta di tempat umum. Dari pernyataan tersebut terbukti bahwa penertiban maupun pembinaan yang dilakukan selama ini belum mampu menuntaskan persoalan tersebut, dan kondisi ini diantaranya mengakibatkan Pemerintah melalui Dinas Sosial sulit mengatasi keberadaan pengemis serta semakin hari jumlah pengemis terus bertambah di Kabupaten Pemalang.

Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan masalah kesejahteraan sosial dan persoalan ini sudah menjadi masalah yang sangat dasar yang belum terselesaikan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Selain itu, permasalahan ini juga sangat kompleks dalam penanganan, sehingga membutuhkan transparan antar lembaga yang berkaitan dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Berdasarkan uraian tersebut, maka pentingnya diadakan suatu kajian terkait penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang. Meskipun sudah dilakukan beberapa upaya dalam penanganan gelandangan dan pengemis seperti razia, pembinaan, rehabilitasi. Oleh karena itu penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Pemalang”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan mendatangkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani

gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberi pengalaman, pengetahuan, serta wawasan kepada peneliti terhadap peran Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang

b. Bagi Dinas Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau membantu Dinas Sosial dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Pemalang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa informasi dan wawasan tentang peran Dinas Sosial dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano (1988:2930) dalam Keban (2014:3) Administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk membuat, melaksanakan, dan mengelola keputusan kebijakan publik. Selain itu, administrasi publik adalah seni dan ilmu yang dirancang untuk mengelola urusan publik dan melakukan berbagai tugas yang ditentukan. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan.

Barton dan Chappel dalam Keban (2014:5) melihat administrasi publik sebagai *the work of government* definisi ini lebih berfokus pada keikutsertaan personi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini Dinas Sosial adalah penyelenggara pemerintah yang dibentuk atas dasar kepentingan publik dan berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik.

Menurut Denhardt & Denhardt, karena pemilik kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang kedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang

disebut sebagai *new public service*. Warga negara seharusnya ditempatkan di depan, dan penekanan tidak seharusnya membedakan antara mengarahkan dan mengayuh tetapi lebih pada bagaimana membangun institusi publik yang didasarkan pada integritas dan responsivitas. Perspektif *new public service* mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi pemerintahan demokrasi. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai semata persoalan kepentingan pribadi (*self interest*) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (*owners of government*) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama.

Administrasi publik memiliki cakupan yang sangat dinamis karena akan berubah seiring berkembangnya kebutuhan atau dinamika yang dialami oleh masyarakat, seperti yang dikemukakan Chandler dan Plano (1988) dalam Keban (2014:8) yaitu administrasi publik bekerja tergantung dengan kompleksitas pada permasalahan-permasalahan kehidupan yang terjadi di masyarakat. Adapun ruang lingkup administrasi menurut Nicholas Henry (1995) yaitu Organisasi publik, Manajemen publik dan Implementasi.

Literatur kuno yang spesifik dan terang-tetangan menyebutkan terkait administrasi publik memang tidak begitu banyak, namun tidak sedikit ilmuwan jaman dahulu yang membahas tentang hal yang masih “serumpun” dengan

administrasi publik seperti Plato yang merilis karya berjudul “The Laws”, isinya adalah tentang bagaimana proses administrasi yang berjalan pada pemerintahan Yunani Kuno. Dalam buku tersebut Plato membagi administrasi kedalam tiga cabang yaitu pengawas kota, pengawas agora dan pengawas tempat ibadah. Dalam karyanya tersebut Plato juga menerangkan tentang hak dan kewajiban pegawai dan sanksi apabila terjadi pelanggaran, bahkan pada saat itu telah dilakukan penyaringan calon pegawai melalui seleksi untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi pegawai.

Ilmu administrasi publik mengalami perkembangan yang terwujud dengan perubahan paradigma, hal tersebut sesuai dengan Kuhn (1970) dalam Keban (2014:31) yang mengungkapkan bahwa perubahan paradigma dapat menjadi bukti bahwa suatu disiplin ilmu berkembang. Perubahan paradigma administrasi publik terjadi dalam lima tahap sebagaimana yang diterangkan Nicholas Henry yaitu:

a. Paradigma 1 (1900 - 1926)

Paradigma yang pertama adalah yang terkenal dengan paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Tokoh yang tersohor pada paradigma ini adalah J. Goodnow dan Leonard D. White, Goodnow dalam bukunya yang berjudul “Politics and administration” menjelaskan bahwa negara memiliki dua fungsi yaitu politik dan administrasi, politik yaitu segala hal yang berkaitan dengan kebijakan ataupun perwujudan dari kehendak negara, sedangkan administrasi berhubungan dengan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut.

b. Paradigma 2 (1927 - 1937)

Dikenal dengan paradigma prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip tersebut yang dinamakan POSDCORB yaitu akronim dari *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*, yang dijadikan sebagai focus administrasi publik kala itu, sedangkan tidak ada lokus yang pasti karena prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintahan. Dengan demikian, dalam paradigma ini, focus lebih ditekankan dari pada locus nya.

c. Paradigma 3 (1950 - 1970)

Paradigma 3 adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Periode ini dianggap sebagai upaya untuk meninjau kembali segala jalinan konseptual antara administrasi publik dan politik. Karena pemisahan politik dengan administrasi dianggap sebagai hal yang tidak mungkin. Upaya “branding” yang menitikberatkan pada politik tersebut membuat Administrasi Publik pada masa ini mengalami krisis identitas karena karena Ilmu Politik dianggap terlalu dominan.

d. Paradigma 4 (1956 - 1970)

Paradigma ini adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi. Dalam paradigma ini prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern seperti metode kuantitatif, analisis sitem, riset operasi, merupakan fokus dari paradigma ini. Dua arah perkembangan terjadi dalam paradigma ini,

yaitu berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin psikologi sosial dan tertuju pada kebijakan publik. Karena semua fokus diterapkan tidak hanya didunia bisnis tetapi dalam dunia administrasi publik menjadikan locusnya menjadi tidak jelas.

e. Paradigma 5 (1970 - Sekarang)

Paradigma 5 merupakan paradigma terakhir yang disebut sebagai administrasi publik. Paradigma ini telah memiliki fokus dan locus yang jelas. Fokus dari paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan locusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan publik. (Keban, 2014: 31-33)

Dari perkembangan ilmu administrasi publik yang mengalami beberapa kali perubahan cara pandang tersebut dapat disimpulkan, setidaknya hingga saat ini, ada unsur-unsur penting dalam administrasi publik, yaitu kebijakan publik yang menurut Lemay (2002) dalam Keban (2014:60) didefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah atau pejabat pemerintah, selain kebijakan publik, terdapat pula unsur lain yang disebut manajemen publik.

2.2 Manajemen Publik

Menurut Donovan dan Jackson (1991) dalam Keban (2014:92) Manajemen adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan pada tingkatan organisasi tertentu, sebagai serangkaian keterampilan (skills) dan sebagai serangkaian tugas. Menurut Manulang (Atik & Ratminto, 2012:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

penyusunan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Fungsi manajemen menurut Allison (1997) dalam Keban (2014:106) yaitu:

1. Menciptakan tujuan dan prioritas,
2. Menyusun rencana operasional,
3. Melakukan pengorganisasian dan staffing,
4. Mengarahkan para pegawai dan sistem manajemen kepegawaian,
5. Mengendalikan Kinerja,
6. Berurusan dengan unit-unit luar
7. Berurusan dengan organisasi-organisasi independen,
8. Berurusan dengan media masa dan publik.

Manajemen publik adalah manajemen pemerintah, yang artinya manajemen publik juga bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2014:92) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Overman dalam Keban (2014:92) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah "*scientific manajemen*", meskipun sangat dipengaruhi oleh "*scientific manajemen*". Manajemen publik bukanlah "*policy analysis*", bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan

antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Mahmudi, 2010).

Terdapat empat prinsip terkait manajemen publik yang dikemukakan Wilson yaitu:

1. Pemerintah sebagai setting utama organisasi
2. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama
3. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi
4. Metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik (Perry & Kraemer, 1991)

Keempat prinsip yang dikemukakan Wilson memberikan dampak pada perkembangan manajemen publik yang kemudian membuat terjadinya pergeseran paradigma pada manajemen publik yang sejalan dengan perkembangan administrasi publik. Ciri dan karakter manajemen publik berubah pada setiap paradigmanya, yaitu sebagai berikut:

1. Paradigma Pertama

Hal yang paling menonjol adalah pengembangan sistem rekrutmen pegawai yang harus dilaksanakan pemerintah termasuk juga didalamnya ujian pegawai negeri, klasifikasi jabatan, promosi, dan pensiun secara lebih baik, selain itu juga terkait pengembangan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya barang/jasa yang harus diusahakan lagi agar lebih akuntabel hal tersebut perlu dilakukan demi tercapainya tujuan negara.

2. Paradigma Kedua

Pada paradigma kedua muncul prinsip yang dikenal dengan POSDCORB dimana prinsip tersebut diklaim sebagai prinsip yang universal dan fleksibel dalam penerapannya.

3. Paradigma Ketiga

Paradigma ketiga muncul beberapa pihak yang mengkritik pada periode paradigma sebelumnya yaitu menanggapi bahwa fungsi manajemen tidak perlu diajarkan secara normatif karena hanya akan membuat manajemen publik dipandang sebagai politik sebagaimana yang terjadi pada administrasi publik pula.

4. Paradigma Keempat

Pada paradigma ini konsep manajemen lebih dikembangkan, terbukti dengan didirikannya sekolah-sekolah yang secara spesifik mempelajari administrasi publik serta manajemen publik. Pada paradigma ini juga

mulai dikenal fungsi-fungsi manajemen yang berupa human relations, komunikasi, perilaku organisasi dan sebagainya.

5. Paradigma Kelima

Paradigma ini menandai manajemen publik yang semakin berkembang hingga sekarang

Manajemen publik yang terdapat di Dinas Sosial dapat digunakan sebagai *platform* untuk melihat peran yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang.

2.3 Teori Peran

Menurut Abdulsyani (2007:94), peran adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam rangkaian menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Peran seseorang dapat terlihat ketika dirinya melaksanakan hak dan kewajiban, apakah kedua hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan kedudukan sosial atau status yang dimiliki ya atau tidak. Status yang tersemat pada seseorang biasanya akan menimbulkan harapan-harapan baru di masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan definisi peran yang dikemukakan oleh (Horton, 1999: 118) Peran yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Status dan peran adalah dua hal yang berjalan berdampingan karena status terbentuk dari seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemanfaatan dari seperangkat hak dan kewajiban tersebut.

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran , yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Dari definisi-definisi mengenai peran yang telah diuraikan diatas, peran dapat didefinisikan secara singkat dengan bagaimana seseorang dapat memanfaatkan kedudukan atau statusnya untuk menjalankan suatu sistem dalam sebuah organisasi dan dengan membawa harapan-harapan baru.

2.3.1 Teori Peran Jim Ife

Adapun teori peran menurut Jim Ife (2008), peran dapat dibedakan menjadi empat bagian yaitu:

a. Peran fasilitatif

Peran fasilitatif merupakan peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui dan menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Membangun kesepakatan dengan sesama pihak untuk melakukan

kerjasama dalam rangka pengembangan potensi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat.

b. Peran Edukasi

Peran edukasi adalah peran yang berkaitan dengan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memberikan informasi ataupun pengetahuan. Dinas Sosial berperan dalam menetapkan agenda, tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman bagi individu dan kelompok masyarakat.

c. Peran Representasional

Peran yang digunakan untuk menunjukkan berbagai peran pekerja dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan, atau agar bermanfaat bagi masyarakat. Dimana Dinas Sosial melakukan interaksi dan menjalin relasi dengan pihak luar yang memiliki fungsi bersesuaian dengan penanganan gelandangan dan pengemis. Tujuan peranan ini dilakukan yaitu mendapatkan sumber-sumber tetapi dengan berbagai pertimbangan yang matang, menerima dukungan dari pihak lain yang lebih besar, membuka jaringan kerja dengan mengembangkan relasi.

d. Peran Teknis

Peran yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Kemampuan pegawai Dinas Sosial dalam menangani

gelandangan dan pengemis, serta kemampuan penyelenggaraan secara teknis tahapan penanganan gelandangan dan pengemis.

2.3.2 Teori Peran Soerjono Soekanto

Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran aktif merupakan suatu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut bisa dilihat atau diukur dari kehadirannya serta juga kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif merupakan suatu peran yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang ke kehidupan masyarakat.
- 2) membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- 3) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002 : 246).

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal yaitu :

- 1) Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya

- 2) Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakan. Mereka harus lebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya
- 3) Dalam masyarakat kadang kala di jumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak
- 4) Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang-peluang tersebut.

Dari teori tersebut penulis mengartikan bahwa tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang bagi pemegang kedudukan.. Penggunaan teori Soerjono Soekanto pada penelitian ini dinilai sesuai dengan variabel dari permasalahan yang ada, sehingga dengan menggunakan teori Soejono Soekanto dapat dilihat sejauh apa peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Pematang dan bagaimana penilaian peranan tersebut.

2.4 Gelandangan dan Pengemis

Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan “gepeng”, masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan “gepeng” tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosa kata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam dalam kebijakan Pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui dikota-kota besar maupun kota kecil.

Gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Gelandangan dan pengemis merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat. Dalam keterbatasan ruang lingkup sebagai gelandangan tersebut, mereka berjuang untuk mempertahankan hidup di daerah perkotaan dengan berbagai macam strategi, seperti menjadi pemulung, pengemis, pengamen, dan pengasong.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Kemudian, menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Iqbali (2005) gelandangan dan pengemis adalah kelompok yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan, mereka sudah terbiasa hidup dengan kemiskinan dan ketebatasan. Selanjutnya menurut Sarwono (2005), gelandangan dan pengemis adalah orang miskin yang hidup di kota-kota yang tidak mempunyai tempat tinggal tertentu yang sah menurut hukum orang-orang ini menjadi beban pemerintah kota karena kehadiran mereka ikut menyedot dan memanfaatkan fasilitas perkotaan, namun tidak membayar kembali fasilitas yang mereka nikmati, tidak membayar pajak misalnya

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, gelandangan adalah seseorang yang menjalankan hidup dalam lingkungan masyarakat dengan keadaan kehidupan sosial yang tidak normal serta mengembara untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal walupun itu tidak tetap. Sedangkan pengemis adalah seseorang yang mennjalakn hidupnya dengan meminta-minta di muka umum untuk penghasilannya.

Adapun secara spesifik, kriteria gelandangan dan pengemis antara lain:

a. Karakteristik Gelandangan

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal disembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.

- 2) Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas dan liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakatpada umumnya.
- 3) Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan bau atau barang bekas.

b. Karakteristik Pengemis

- 1) Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun.
- 2) Meminta minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya.
- 3) Bertingkah laku untuk mendapat belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang mendoakan, sumbangan untuk organisasi tertentu.
- 4) Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur pada penduduk pada umumnya

2.5 Hasil Penelitian Yang Relevan

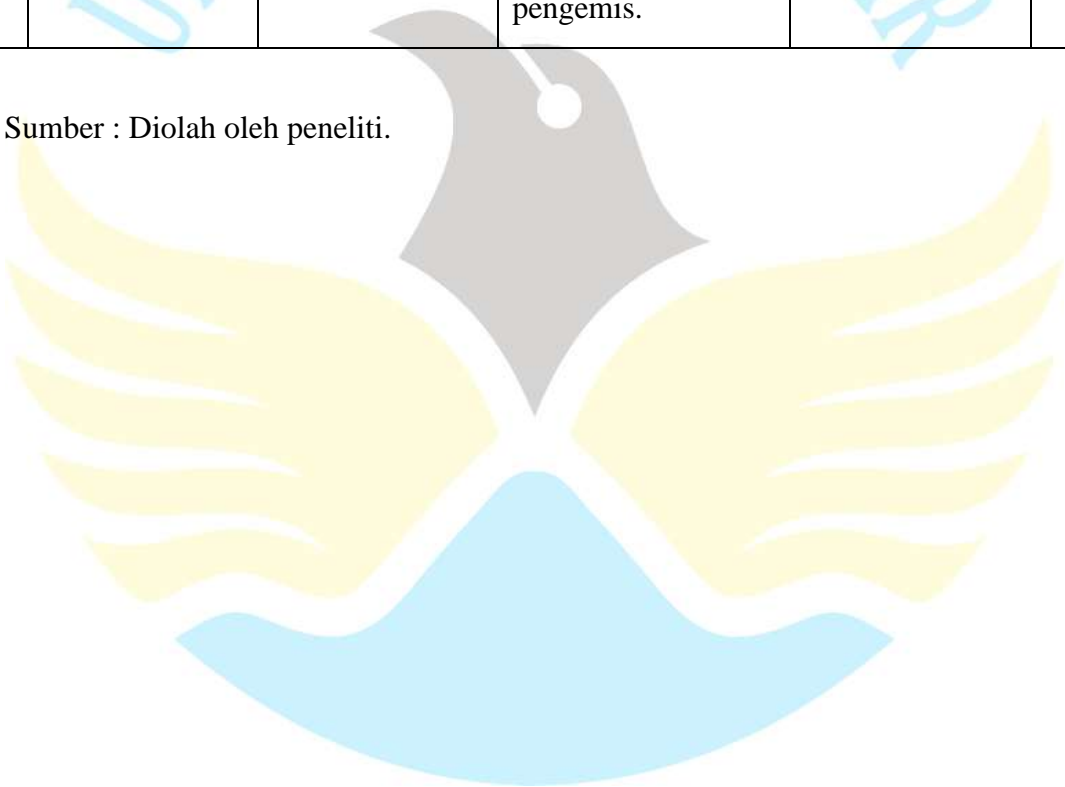
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Yang Relevan

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Teori & Metode	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Novi Nur Rohmah, Model Penanganan Bagi Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas, 2017	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, Metode kualitatif deskriptif	Pengaturan model penanganan di Kabupaten Banyumas berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Model penanganan yang diterapkan yaitu model preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut. Menurut teori struktural fungsionalisme dan teori konflik, model penanganan tersebut dapat menyebabkan disintegrasi sosial karena adanya perbedaan kepentingan	Keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara observasi dan dokumentasi, dan objek kajian berfokus pada penanganan gelandangan dan pengemis	Teori yang digunakan dalam menganalisis, penelitian pada Skripsi terdahulu ini tidak hanya meneliti penanganan gelandangan dan pengemis namun lebih lengkap juga meneliti tentang Orang terlantar sedangkan penelitian skripsi ini meneliti penanganan Dinas Sosial terhadap gelandangan dan pengemis saja
2.	Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banda	Peraturan Walikota Kota Banda Aceh nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis,	Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menanggulangi pengemis belum efektif, karena jumlah SDM, SDA kurang dan belum	Keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara	Teori yang digunakan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam menangani pengemis

	Aceh, Tahun 2018	Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya (preventif, koersif, rehabilitasi dan integrasi sosial), Metode kualitatif deskriptif	solidnya koordinasi antara SKP, dan tidak ada aturan yang jelas terkait tanggung jawab ini	observasi dan dokumentasi, dan objek kajian berfokus pada masalah pengemis	
3.	Akbar Maulana, Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember, Tahun 2021	Teori strategi menurut Bimo Walgito, Metode kualitatif deskriptif	Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa upaya penanganan masalah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember masih belum banyak menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat parsial dan karitatif serta belum didukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin dan PMKS masih dipandang sebagai sampah pembangunan yang harus dibersihkan.	Keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara observasi dan dokumentasi, dan objek kajian berfokus pada penanganan gelandangan dan pengemis	Teori yang digunakan untuk menganalisis, upaya-upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis
4.	Nur Aprilyanti, Muh Nur Yamin, Andi Cudai Nur, Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Makassar,	Teori peran menurut Gede Diva, Metode kualitatif deskriptif	Dinas Sosial dalam penanganan pengemis di Kota Makassar kurang berperan dalam penanganan pengemis di Kota Makassar. Hal utama yang menyebabkan peran	Keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara observasi dan dokumentasi,	Teori peran yang digunakan dalam menganalisis peran Dinas Sosial dalam menangani pengemis, tempat

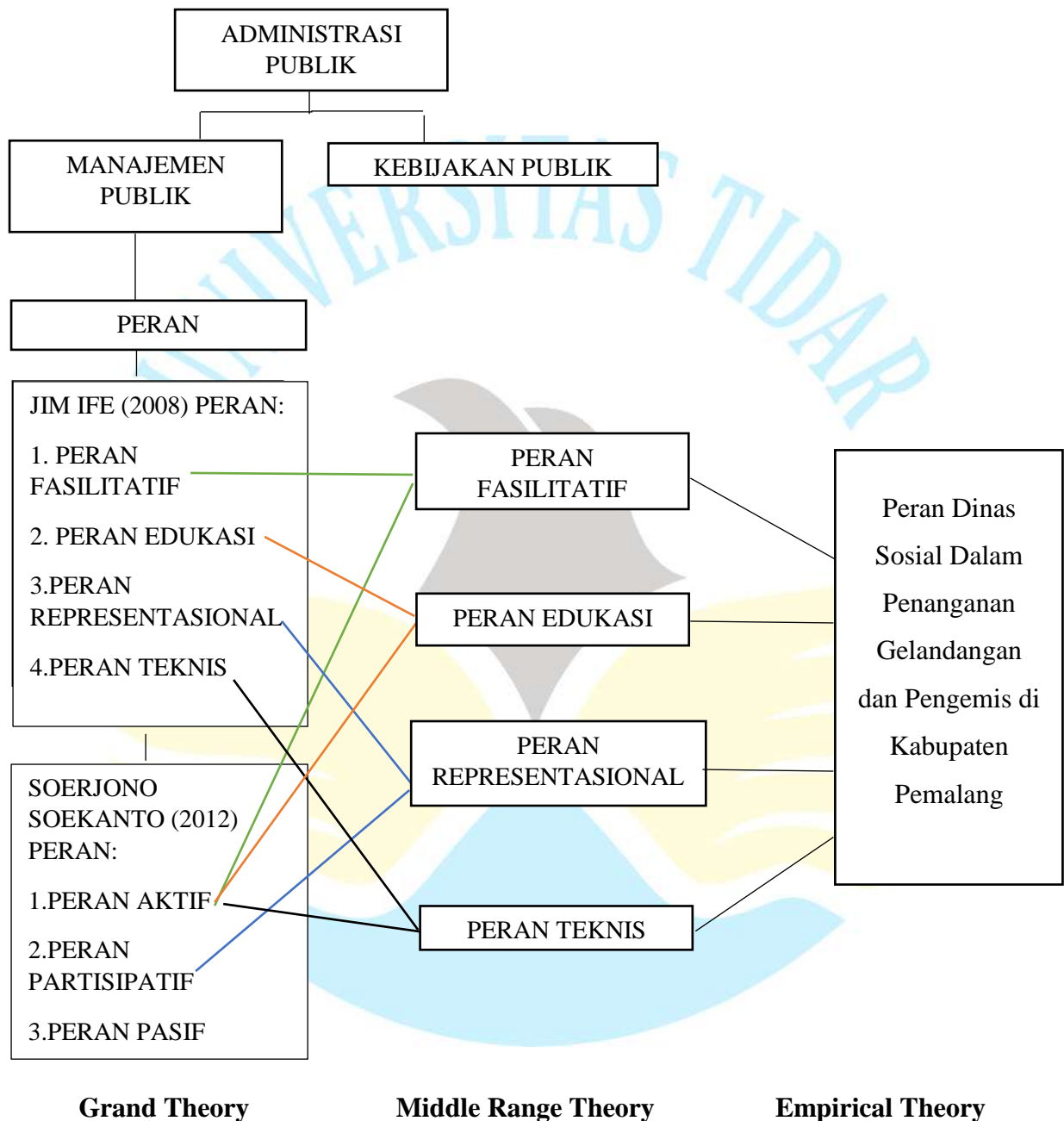
	Tahun 2021		Dinas Sosial kurang berperan secara maksimal dalam penanganan pengemis adalah belum adanya panti rehabilitasi lanjutan untuk para pengemis mendapatkan pembinaan serta kurangnya pelatihan keterampilan yang diberikan Dinas Sosial Kota Makassar kepada pengemis.	dan objek kajian berfokus pada penanganan gelandangan dan pengemis	penelitian
--	------------	--	--	--	------------

Sumber : Diolah oleh peneliti.



2.6 Kerangka Berpikir

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, dalam Meleong (2000:3) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian deskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kedudukan Dinas Sosial. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terletak di Jl. Gatot Subroto No.37, Bojongbata, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang.

Alasan terpilihnya lokasi tersebut adalah karena Dinas Sosial adalah lembaga khusus yang menangani perihal penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang sehingga peneliti merasa informasi yang akan didapatkan akan akurat dan mendalam.

3.3 Sasaran Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi sasaran adalah staf Dinas Sosial Kabupaten Pemalang merupakan badan khusus yang ditunjuk pemerintah daerah Kabupaten Pemalang dalam mengurus perihal penanganan gelandangan dan pengemis yaitu Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC), Pekerja Sosial Penyelia Panti PGOT, gelandangan dan pengemis.

3.4 Fokus Kajian

Fokus kajian pada penelitian ini mempunyai empat gejala yaitu peran fasilitatif, peran edukasi, peran representasional, dan peran teknis. Dimana masing-masing gejala tersebut mempunyai dua sub gejala yaitu gelandangan pelayanan dan rehabilitasi. Pelayanan dan rehabilitasi tersebut merupakan tugas pokok seksi yang menangani masalah gelandangan dan pengemis yaitu seksi perlindungan dan rehabilitasi sosial.

Fokus kajian dalam penelitian dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 3.1 Fokus Kajian

Konsep	Gelaja	Sub Gejala
Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Pematang	1. Peran Fasilitatif	1. Pelayanan 2. Rehabilitasi
	2. Peran Edukasi	1. Pelayanan 2. Rehabilitasi
	3. Peran Representasional	1. Pelayanan 2. Rehabilitasi
	4. Peran Teknis	1. Pelayanan 2. Rehabilitasi

Sumber: Diolah oleh peneliti.

3.5 Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2000:112) berpendapat bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam hal ini, pada bagian ini jelas bahwa data terbagi menjadi kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Jika wawancara dalam pengumpulan data, maka

sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang menanggapi atau menjawab pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Jika menggunakan observasi, sumber datanya berupa benda, gerak, atau proses dari sesuatu. Jika menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan adalah sumber datanya. Suharsimi Arikunto (2002:107). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

b. Data Sekunder

Data diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3.6 Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *Simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) teknik *purposive sampling* merupakan sebuah teknik penentuan sampling dengan cara melakukan pertimbangan tertentu dalam menentukan sampelnya. Menurut

Margono (2004:126) *Simple random sampling* yaitu teknik untuk menentukan informan yang langsung dilakukan pada unit informan. Dengan demikian setiap unit informan sebagai unsur populasi yang paling terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi informan. Pemilihan teknik ini juga memberikan alasan bagi peneliti untuk menggunakannya karena teknik ini dianggap nantinya akan memberikan informasi dan juga data yang akurat dan dianggap memiliki kemampuan dan kapasitas yang cukup untuk memberikan informasi terkait peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pematang Jaya. Peneliti menggunakan *Purposive sampling* pada saat mewawancarai informan yang memiliki informasi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, Sedangkan dalam hal ini penerapan *Random Sampling* dilakukan kepada gelandangan dan pengemis yang berada di rumah singgah dengan bertujuan untuk menguatkan dan mengembangkan informasi terkait informasi yang didapatkan dari informan yang menggunakan teknik *purposive* terkait peran Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pematang Jaya.

Tabel 3. 2 Daftar Informan

No.	Informan	Jumlah	Metode
1.	Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	1 Orang	<i>Purposive sampling</i>
2.	Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC)	1 Orang	<i>Purposive sampling</i>
3.	Pekerja Penyelia Panti PGOT	1 Orang	<i>Purposive sampling</i>
4.	Gelandangan dan Pengemis yang berada di Rumah Singgah	3 Orang	<i>Random sampling</i>
	Total	6 Orang	

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2014:225) pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi di lapangan, wawancara dengan informan, pembagian kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Cara yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua cara, yaitu melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui mencari dan memperoleh data dari instansi terkait yang dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan langsung terhadap fenomena atau peristiwa yang dilakukan peneliti kepada obyek yang diteliti berkaitan dengan peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis untuk menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari hasil observasi tersebut selanjutnya dimasukan dan dicatat sehingga membentuk suatu informasi yang dibutuhkan dalam fokus penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah pertemuan antar dua orang atau lebih untuk memberikan informasi dan ide yang dilakukan dengan cara tanya jawab, sehingga dapat diambil kesimpulan suatu makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara sering kali digunakan dalam metode penelitian kualitatif oleh peneliti. Wawancara juga digunakan oleh peneliti sebagai cara yang dilakukan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang tidak bisa diperoleh dari penelitian di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan sebuah cara pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan data tambahan atau data pendukung dengan cara mempelajari maupun mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti di lapangan. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan ataupun gambar. Dengan adanya dokumentasi penelitian menjadi lebih dapat dipercaya dan juga dapat menguatkan hasil dari observasi dan wawancara.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui membaca serta mempelajari buku-buku, jurnal, dokumen dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Menurut teori Miles, Huberman dan Saladana (2014:8) menerangkan bahwa aktivitas analisis data dalam sebuah penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilaksanakan secara berulang-ulang sampai tuntas sehingga datanya dapat dianalisis. Adapun tahapan dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Mengumpulkan data sebelum penelitian dan setelah penelitian dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara, observasi, dokumen-dokumen yang ada dengan masalah yang ditemukan di lapangan kemudian data dikembangkan melalui tahap selanjutnya.

2. Kondensasi data

Miles dan Huberman (2014:10) dalam kondensasi data menuju pada proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksi dan mentransformasi data yang didapatkan dalam catatan di lapangan ataupun transkrip dalam sebuah penelitian yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemilihan, dalam proses pemilihan peneliti harus bergerak selektif, maksudnya yaitu menentukan bagian-bagian mana yang lebih penting, hubungan yang mungkin memiliki makna dan informasi yang didapat kemudian dikumpulkan dan dianalisis.
- b. Pengerucutan, pada tahap ini yaitu pemfokusan data yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Tahap ini ialah keberlanjutan

pada tahap seleksi data. Dalam hal ini data dalam penelitian dibatasi karena harus didasarkan pada rumusan masalah.

c. Peringkasan, pada tahap ini data yang dikumpulkan kemudian diseleksi khususnya yang berhubungan dengan kualitas data dan cakupan data.

d. Penyederhanaan dan transformasi, menyederhanakan data yang diperoleh dalam penelitian dan di transformasikan dalam dengan cara seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, mengolongkan data dalam satu pola yang lebih luas.

3. Penyajian data

Penyajian data berfungsi agar dalam menyederhanakan data dan informasi yang bersifat umum sehingga lebih mudah untuk dipahami. Peneliti menyajikan data sesuai dengan apa yang diperoleh di lapangan kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu suatu usaha untuk mencari dan memahami alur sebab akibat, pola atau keteraturan, dan makna dari data yang sudah disajikan. Selain itu, penarikan kesimpulan juga merupakan gambaran dari objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara analisis dan mengecek secara berulang dengan bukti yang diperoleh dalam penelitian di lapangan.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kali ini teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah triangulasi. Menurut Sugiyono (2014: 273) teknik keabsahan data triangulasi merupakan pengecekan data dari sumber-sumber yang ada dan memiliki banyak variasi cara dan waktu. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data, teknik tersebut digunakan karena dianggap akan lebih memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan penyusunan hasil penelitian. Teknik triangulasi sumber data digunakan untuk membuktikan keabsahan data kepada pihak yang terlibat dalam penanganan gelandangan dan pengemis, yaitu:

1. Dinas Sosial Kabupaten Pemalang sebagai pihak utama yang memiliki hak dan kewajiban dalam hal penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pemalang
2. Masyarakat, masyarakat disini yakni gelandangan dan pengemis guna untuk mengetahui apa benar Dinas Sosial Kabupaten Pemalan sudah melaksanakan peran-perannya secara baik dalam menangani gelandangan dan pengemis.

DAFTAR PUSTAKA

- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Startegis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Sari, N. (2020). *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Banjarbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Hassannah, I. N. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Penge mis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Sari, N. (2020). *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Pengemis di Kota Banjarbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Zamharira, C., & Arantika, D. P. (2018). Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 4(1), 115-127.

Skripsi

- Bahagia. (2020). Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry , Banda Aceh*.
- Maulana, A. (2013). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, Jember*.
- Novi Nur Rohmah, Model Penanganan Bagi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas, skripsi Universitas Negeri Semarang 2017.
- Soraya, I. (2017). *Peran dinas sosial kota Makassar dalam penanganan pengemis di kecamatan Panakkukang kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Fadhillah, R., Marlina, S., & Nurman, N. (2021). *Peran Dinas Sosial Kota Jambi Dalam Mengatasi Gelandangan Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Di Kelurahan Simpang Pulai Kota Jambi*

Sumber Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1)

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penertiban Tuna Sosial di Kabupaten Pemalang

Detikgo.com (2021) Maraknya Pengemis dan Pengamen di Lampu Merah Sirandu Pemalang, Pengguna Jalan Meminta Pemerintah Tertibkan <https://detikgo.com/2021/08/11/marak-pengamen-dan-pengemis-di-lampu-merah-sirandu-pemalang-pengguna-jalan-minta-pemerintah-tertibkan/> diakses 20.05 13 oktber 2022

Sindonews.com (2022) Negara-negara dengan Jumlah Gelandangan terbanyak di Dunia, No. 5 tak disangka <https://international.sindonews.com/read/689463/40/negara-negara-dengan-jumlah-gelandangan-terbanyak-di-dunia-nomor-5-tak-disangka>. (diakses pada 18 Desember 2022 pukul 11.33 WIB)

Detik.com (2022) Indonesia Peringkat ke4 Daftar Negara Berpenduduk Terbanyak Dunia <https://travel.detik.com/travel-news/d-6078152/indonesia-peringkat-ke-4-daftar-negara-berpenduduk-terbanyak-dunia/amp> (diakses 19 Desember 2022 pukul 19.34 WIB)

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran I. Matriks Penelitian

Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Grand Theory	Middle Range Theory	Aspek	Konsep	Fenomena	Gejala	Sub Gejala	Daftar Pertanyaan
Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Pemalang	Bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Pemalang?	Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Pemalang	<p>Jim Ife (2008) peran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Fasilitatif 2. Peran Edukasi 3. Peran Representasi 4. Peran Teknis <p>Soerjono Soekanto (2012) peran dibagi menjadi 3 (tiga):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Aktif 2. Peran Partisipatif 3. Peran Pasif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Fasilitatif 2. Peran Edukasi 3. Peran Representasi 4. Peran Teknis 	Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Pemalang	<p>Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Kabupaten Pemalang adalah tupoksi dari bidang sosial seksi rehabilitasi sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan - Rehabilitasi 	Peran	1. Peran fasilitatif	1. Pelayanan	1. Apakah dalam pelayanan Dinas Sosial memberikan fasilitas kepada gelandangan dan pengemis?
									2. Rehabilitasi	2. Apa saja fasilitas yang diberikan Dinas Sosial dalam pelayanan gelandangan dan pengemis?

									<p>gelandangan dan pengemis?</p> <p>2. Apa saja fasilitas yang diberikan Dinas Sosial dalam rehabilitasi gelandangan dan pengemis?</p>
							2. Peran Edukasi	<p>1. Pelayanan</p> <p>2. Rehabilitasi</p>	<p>1. Apakah dalam pelayanan Dinas Sosial memberikan informasi atau pengetahuan kepada gelandangan dan pengemis?</p> <p>2. Pengetahuan atau edukasi apa saja yang diberikan Dinas Sosial dalam pelayanan?</p> <p>1. Apakah dalam rehabilitasi Dinas Sosial memberikan edukasi atau pengetahuan kepada</p>

gelandangan dan pengemis?

2. Bagaimana cara Dinas Sosial memberikan edukasi atau pengetahuan tersebut kepada gelandangan dan pengemis?

3. Peran Representasi

1. Pelayanan

1. Apakah Dinas Sosial berinteraksi dengan pihak luar dalam pelayanan gelandangan dan pengemis?

2. Bagaimana bentuk kerjasama antara Dinas Sosial dengan pihak lain dalam pembinaan gelandangan dan pengemis?

2. Rehabilitasi

1. Apakah Dinas Sosial berinteraksi

dengan pihak luar dalam rehabilitasi gelandangan dan pengemis?

2. Bagaimana bentuk kerjasama antara Dinas Sosial dengan pihak lain dalam rehabilitasi gelandangan dan pengemis?

4. Peran Teknis

1. Pelayanan

1. Bagaimana teknis pelayanan tersebut yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis?

2. Rehabilitasi

1. Bagaimana teknis rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis?

Lampiran II. Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.12 / 638 / DINSOS KBPP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATKHUROKHMAN, S.H.,M.Si.
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinsos KBPP Kab. Pemalang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YOFA ALDILLA DELLAS MEIDIANTI
NPM : 1910201015
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Perguruan Tinggi : Universitas Tidar Magelang
Judul Skripsi : "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Pemalang"

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang terhitung tanggal 24 Maret 2023 - 27 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 28 Maret 2023

A.n Kepala
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pemalang
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



FATKHUROKHMAN, S.H.,M.Si.
Pembina
NIP 19671014 198903 1 005

Alamat : Jalan Jend. Gatot Subroto No. 37 Telp. (0284) 321193, Pemalang 52319
Email : dinsoskbpp.pemalang@gmail.com

Lampiran III. Kondensasi Data

Fenomena	Gejala	Sub Gejala	Pertanyaan	Jawaban
Peran	Peran Fasilitatif	Pelayanan	1. Apakah dalam pelayanan Dinas Sosial memberikan fasilitas kepada gelandangan dan pengemis?	1. Ibu Nina Min Lusiyana Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Senin, 13 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB) “Untuk fasilitas pastinya kami memberikan fasilitas-fasilitas kepada gelandangan dan pengemis”
			2. Apa saja fasilitas yang diberikan Dinas Sosial dalam pelayanan gelandangan dan pengemis?	1. Ibu Nina Min Lusiyana Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Senin, 13 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB) “ Untuk fasilitas yang kita berikan ini lebih kepada tempat atau panti. Jadi hasil dari razia Satpol PP itu nantinya akan dibawa ke Dinas Sosial untuk memberikan rehabilitasi sosial di sini kita ada ruangan khusus untuk mengassessmen yang bersangkutan.” 2. Tri Argi Azhari selaku Koordinator Tim Reaksi Cepat (Senin, 15 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB) “ Dinas Sosial Kabupaten Pematang sudah memfasilitasi

				<p>Rumah singgah untuk ditempati oleh mereka yang memang terkena razia oleh Satpol PP, tetapi mereka disini paling cuma tiga hari maksimal tujuh hari, nanti kita lakukan pembinaan fisik, mental dan disini mereka akan diberi kebutuhannya dasar seperti sandang pangan.”</p> <p>3. Galih Gelandangan yang berada di rumah singgah (Rabu, 22 Maret 2023 pukul 14.00)</p> <p>“ Untuk fasilitasnya itu tempat tinggal sementara, di panti ini saya dan teman-teman yang berada di panti ini diberi makanan, minuman, pakaian, termasuk layanan kesehatan.” (wawancara dilakukan pada 22 Maret 2023)</p> <p>4. M. Afif Galang Pekerja Sosial Penyelia Panti (Rabu, 22 Maret 2023 Pukul 14.30 WIB)</p> <p>“Dinas Sosial memberikan fasilitas untuk para gelandangan dan pengemis, salah satu fasilitas yang diberikan Dinas Sosial yaitu</p>
--	--	--	--	--

				rumah singgah untuk mereka dan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan. Di pelayanan fasilitas yang diberikan tidak hanya rumah singgah saja tetapi kebutuhan sandang pangan seperti pakaian, makanan, layanan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Di rumah singgah kami memberikan fasilitas seperti kamar tidur dengan kapasitas 4 orang dan pastinya dipisahkan sesuai dengan jenis kelamin”
		Rehabilitasi	1. Apakah dalam rehabilitasi Dinas Sosial memberikan fasilitas kepada gelandangan dan pengemis?	1. M. Afif Galang Pekerja Sosial Penyelia Panti (Rabu, 22 Maret 2023 Pukul 14.30 WIB) “Di rehabilitasi ini, kita pastinya memberikan fasilitas-fasilitas kepada mereka atau PGOT mba, untuk fasilitasnya itu yang paling penting ada program rehabilitasi.”
			2. Apa saja fasilitas yang diberikan Dinas Sosial dalam rehabilitasi gelandangan dan pengemis?	1. Ibu Nina Min Lusiyana Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Senin, 13 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB) “ Untuk fasilitas di rehabilitasi gelandangan dan pengemis tersebut akan mendapatkan program-program pembinaan yaitu ada pembinaan keterampilan, pembinaan

				<p>spiritual, dan pembinaan mental. Program ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam membantu para gelandangan dan pengemis keluar dari kehidupan mereka dijalanan dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.”</p> <p>2. Tri Argi Azhari selaku Koordinator Tim Reaksi Cepat (Senin, 15 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB)</p> <p>“ Fasilitas dalam rehabilitasi PGOT yaitu berupa pemberian makanan, pakaian, ada layanan kesehatan, kemudian kami juga memberikan bimbingan kepada mereka. Bimbingan tersebut berupa bimbingan fisik, bimbingan mental, dan bimbingan sosial. Bimbingan Selain itu kami juga memberikan pelatihan keterampilan seperti pelatihan benkel, budidaya lele. Pelatihan tersebut dapat membantu para gelandangan dan pengemis untuk mempelajari keterampilan kerja yang dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan.” (wawancara dilakukan pada 15 Maret 2023)</p>
--	--	--	--	--

				<p>3. M. Afif Galang Pekerja Sosial Penyelia Panti (Rabu, 22 Maret 2023 Pukul 14.30 WIB)</p> <p>“ Dalam rehabilitasi untuk fasilitas yang diberikan kurang lebih sama seperti pelayanan yaitu kami memberikan sandang pangan. Kemudian kami juga memberikan layanan kesehatan untuk para PGOT yang berada di rumah singgah, yang nantinya kesehatan mereka akan di cek satu per satu oleh tim medis. Lalu adanya program-program rehabilitasi seperti pelatihan membuat sarung goyor, pelatihan bengkel, dan lain sebagainya.”</p>
	Peran Edukasi	Pelayanan	<p>1. Apakah dalam pelayanan Dinas Sosial memberikan informasi atau pengetahuan kepada gelandangan dan penngemis?</p> <p>2. Pengetahuan</p>	<p>1.Ibu Nina Min Lusiyana Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Senin, 13 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB)</p> <p>“ Iya, Dinas Sosial memberikan edukasi atau pengetahuan kepada gelandangan dan pengemis. Edukasi yang diberikan bertujuan untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka.”</p> <p>1. Tri Argi Azhari selaku</p>

			atau edukasi apa saja yang diberikan Dinas Sosial dalam pelayanan?	<p>Koordinator Tim Reaksi Cepat (Senin, 15 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB)</p> <p>“Untuk edukasi di pelayanan kita memberikannya dengan cara pelatihan atau pembinaan. Seperti pelatihan kerja mba untuk meningkatkan produktivitasnya, yang nantinya akan berguna bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usahanya sendiri dari pelatihan kerja tersebut agar tidak kembali hidup menjadi pengemis ataupun menggelandang. Untuk pelatihan yang diberikan itu berbagai macam mba tergantung minat mereka.”</p> <p>2. M. Afif Galang Pekerja Sosial Penyelia Panti (Rabu, 22 Maret 2023 Pukul 14.30 WIB)</p> <p>“ Dengan cara memberi pelatihan keterampilan kepada gelandangan dan pengemis seperti pelatihan bengkel, pelatihan budidaya lele, membuat sarung goyor, membuat tempe, membuat donat, membuat telur asin, dan pertanian. Edukasi tersebut sangat penting dalam membantu gelandangan dan</p>
--	--	--	--	---

				<p>pengemis mempersiapkan diri untuk hidup mandiri di masa depan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, serta membantu mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan pengetahuan yang mereka dapatkan, diharapkan mereka bisa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mencari pekerjaan, dan hidup mandiri tanpa menjadi gelandangan atau pengemis lagi.”</p>
		Rehabilitasi	<p>1. Apakah dalam rehabilitasi Dinas Sosial memberikan edukasi atau pengetahuan kepada gelandangan dan pengemis?</p>	<p>1. M. Afif Galang Pekerja Sosial Penyelia Panti (Rabu, 22 Maret 2023 Pukul 14.30 WIB)</p> <p>“iya memberikan tadi memberikan arahan agar tidak melakukan hal sama lagi sama. Dan kami juga memberikan edukasi atau pengetahuan berupa pelatihan.”</p>
			<p>2. Bagaimana cara Dinas Sosial memberikan edukasi atau pengetahuan tersebut kepada</p>	<p>1. Ibu Nina Min Lusiyana Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Senin, 13 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB)</p> <p>“ Dinas Sosial memberikan edukasi kepada gelandangan dan pengemis berupa edukasi tentang</p>

			gelandangan dan pengemis?	<p>kesehatan, termasuk pentingnya menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, serta penyakit yang umum terjadi di antara gelandangan dan pengemis seperti penyakit kulit, hepatitis, dan HIV/AIDS. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mereka tentang kesehatan, serta mengurangi risiko terjadinya penyakit dan infeksi. Selain itu, kami juga mengedukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak negatifnya pada kesehatan dan kehidupan seseorang. Tujuannya adalah untuk membantu gelandangan dan pengemis memahami bahaya narkoba dan menghindari penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga adanya bimbingan mental dan spiritual”</p> <p>2. M. Afif Galang Pekerja Sosial Penyelia Panti (Rabu, 22 Maret 2023 Pukul 14.30 WIB)</p> <p>“ Jadi upaya yang dilakukan Dinas Sosial yaitu memberikan edukasi penyuluhan kepada</p>
--	--	--	---------------------------	--

				<p>PGOT, jadi di dalam rumah singgah memiliki 6 perawat yang handle setiap kegiatan sehari-harinya. Edukasi ini dilakukan oleh perawat yang diberikan setiap kegiatan dipagi hari seperti edukasi tentang kesehatan dan jasmani. Selain itu, PGOT tersebut juga mendapatkan edukasi tentang agama dan moral. Seperti nilai-nilai agama dan moral yang penting dalam kehidupan, serta cara menjalankan ibadah. Edukasi ini bertujuan untuk membantu gelandangan dan pengemis dalam membangun nilai-nilai agama dan moral yang baik, serta membantu mereka dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan lingkungan sekitar.”</p> <p>3. Aditya Wijaya Pengemis yang berada di Rumah singgah (Rabu, 22 Maret 2023 pukul 14.00)</p> <p>“ Selama saya berada dirumah singgah saya diberikan pencerahan oleh petugas yang ada dirumah singgah ini, edukasi yang saya terima salah satunya itu kesehatan. Bukan hanya edukasi</p>
--	--	--	--	--

				mengenai kesehatan, edukasi kerohanian pun diberikan, kemudian pembinaan karakter agar kami yang berada di rumah singgah agar jadi manusia yang produktif.”
	Peran Representasional	Pelayanan	1. Apakah Dinas Sosial berinteraksi dengan pihak luar dalam pelayanan gelandangan dan pengemis?	<p>1. Ibu Nina Min Lusiyana Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Senin, 13 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB) “ Dinas Sosial berinteraksi dengan pihak luar dalam pelayanan gelandangan dan pengemis. Pihak luar tersebut dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.”</p> <p>2. M. Afif Galang Pekerja Sosial Penyelia Panti (Rabu, 22 Maret 2023 Pukul 14.30 WIB) “ Kita mungkin bukan interaksi ya mbak, kita berkoordinasi dan berkolaborasi. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai macam instansi seperti instansi dari Dinas Kesehatan, Satpol PP, di Dukcapil. Dinas Kesehatan itu lebih kepada pengecekan kesehatan, kalau misal yang disdukcapil lebih kepada penelusuran yang bersangkutan</p>

				atau pembuatan kartu identitas yaitu KTP dan kalau Satpol PP itu bagian tindakan-tindakan razia di awal yang nantinya akan dilaporkan ke kami untuk mengassesment.”
			2. Bagaimana bentuk kerjasama antara Dinas Sosial dengan pihak lain dalam pembinaan gelandangan dan pengemis?	<p>1. 1. Ibu Nina Min Lusiyana Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Senin, 13 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB)</p> <p>“ Untuk Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan gelandangan dan pengemis ada melakukan kerjasama dengan Satpol PP, Kepolisian dan masyarakat. Gunanya agar mempermudah ketika kami turun razia ada Satpol PP yang membantu. Masyarakat juga bekerjasama dengan kami kalau ada yang melihat gelandangan dan pengemis yang meresahkan, maka masyarakat akan menghubungi pelayanan Dinas Sosial”</p> <p>2. Tri Argi Azhari selaku Koordinator Tim Reaksi Cepat (Senin, 15 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB)</p> <p>“ Bentuk dukungannya seperti</p>

				<p>misal Satpol PP nanti dapat informasi dari masyarakat terkait adanya gelandangan dan pengemis yang meresahkan atau yang berada di titik-titik tertib lalu lintas, kemudian Satpol PP akan menindak gelandangan dan pengemis tersebut kemudian menginformasikan ke Dinas Sosial. Dan Dinas Kesehatan itu untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatan para PGOT yang terrazia oleh Satpol PP. Kemudian ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat membantu membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). ”</p>
		Rehabilitasi	<p>1. Apakah Dinas Sosial berinteraksi dengan pihak luar dalam rehabilitasi gelandangan dan pengemis?</p>	<p>1. Ibu Nina Min Lusiyana Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Senin, 13 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB)</p> <p>“Dinas Sosial biasanya berinteraksi dengan pihak luar dalam rehabilitasi gelandangan dan pengemis. Kolaborasi dengan pihak luar ini dapat membantu memperkuat program rehabilitasi yang ada dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi gelandangan dan pengemis.”</p>

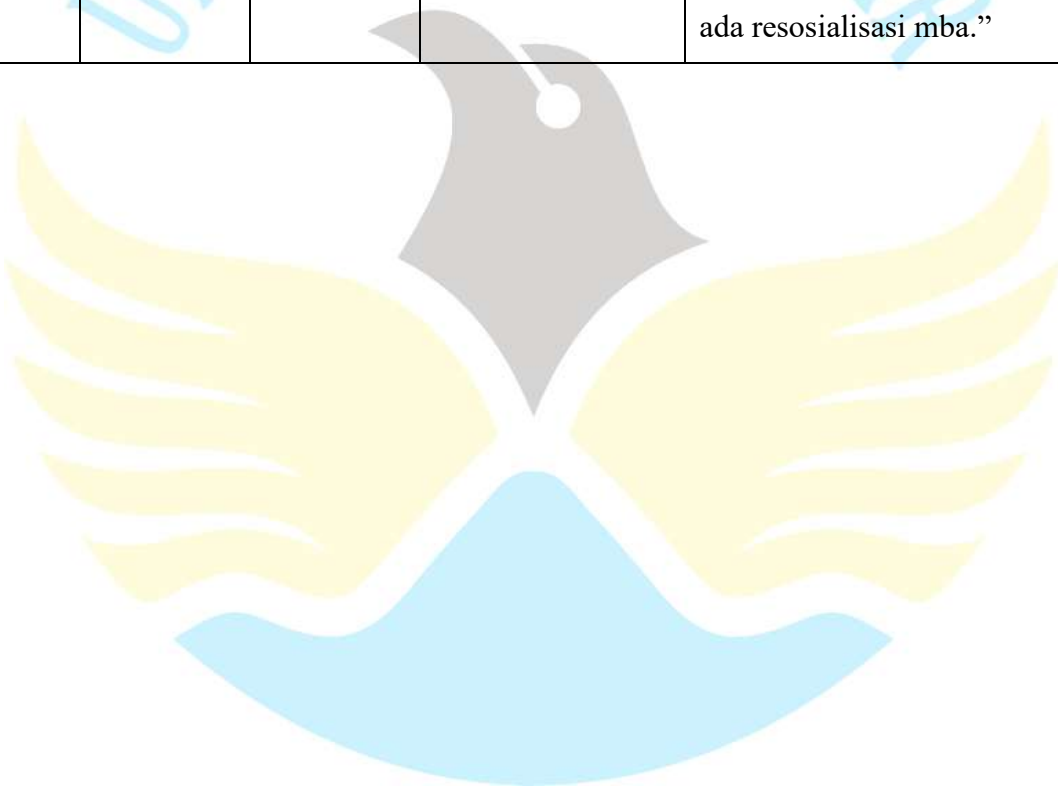
			<p>2. Bagaimana bentuk kerjasama antara Dinas Sosial dengan pihak lain dalam rehabilitasi gelandangan dan pengemis?</p>	<p>1. Ibu Nina Min Lusiyana Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Senin, 13 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB)</p> <p>“ Untuk salah satu bentuk kerjasama yaitu dari lembaga agama, Lembaga agama dapat membantu dalam memberikan pelayanan sosial dan spiritual kepada gelandangan dan pengemis. Kemudian Dinas Kesehatan dapat memberikan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan PGOT. Selain itu, pihak swasta dapat memberikan dukungan finansial atau menyediakan peluang kerja bagi gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitasi.”</p> <p>2. Tri Argi Azhari selaku Koordinator Tim Reaksi Cepat (Senin, 15 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB)</p> <p>“Dinas Sosial dalam rehabilitasi berkolaborasi dengan pihak luar yaitu ada tokoh agama gunanya untuk memberikan pendampingan rohani agar pengemis dan gelandangan tetap memiliki keyakinan iman yang teguh. Kemudian ada Dinas Tenaga</p>
--	--	--	---	---

				Kerja, Dinas tersebut berfungsi dalam pembinaan dimana gelandangan dan pengemis mengikuti pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).”
	Peran Teknis	Pelayanan	1. Bagaimana teknis pelayanan tersebut yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis?	<p>1. Tri Argi Azhari selaku Koordinator Tim Reaksi Cepat (Senin, 15 Maret 2023 Pukul 14.00 WIB)</p> <p>“ Disini kami ada namanya SOP (Stanndar Operassional Prosedur) jadi untuk penanganan PGOT atau gelandangan dan pengemis kami mengikuti SOP yang ada, jika ada laporan dari lembaga seperti Satpol PP kemudian kami akan data terus ketika sudah di data lalu di assessment. Setelah dilakukannya assessment kami merujukn gelandangan dan pengemis tersebut ke panti atau rumah singgah Karya Mandiri.”</p> <p>2. Ibu Nina Min Lusiyanu Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Senin, 13 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB)</p> <p>“Teknis pelyanan yang dilakukan Dinas Sosial yaitu yang pertama ketika ada laporan masuk ke Dinas Sosial, kemudian laporan terebut akan didelegasikan ke Tim</p>

				<p>Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan penjangkauan ke lokasi misal ada ada rumah yang sudah berpenghuni tetapi ditempati PGOT, nanti TRC langsung melakukan penjangkauan kemudian PGOT tersebut di assesment. Misal ada PGOT yang kondisinya tidak memungkinkan untuk di assesment karena sakit kami akan membawa kerumah sakit untuk penanganan medisnya. Setelah assesment, kami rujuk ke panti-panti yang sesuai dengan kebutuhannya ada panti lansia, panti PGOT, panti ODGJ.”</p> <p>3. M. Afif Galang Pekerja Sosial Penyelia Panti (Rabu, 22 Maret 2023 Pukul 14.30 WIB)</p> <p>“ Mengenai teknis yang pastinya untuk pengrekrutan PGOT atau gelandangan dan pengemis tersebut biasanya dapat dari rekomendasi Dinas Sosial. Dimana Dinas Sosial melakukan pendataan dari hasil razia Satpol PP kemudian di assesment, identifikasi, kemudian dirujuk ke Rumah Singgah untuk mendapatkan penanganan.”</p>
--	--	--	--	--

		Rehabilitasi	<p>1. Bagaimana teknis rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani gelandangan dan pengemis?</p>	<p>1. Ibu Nina Min Lusiyana Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial (Senin, 13 Maret 2023 Pukul 13.00 WIB)</p> <p>“ Terkait teknis dalam rehabilitasi kami memiliki 5 tahapan mba, yang pertama ada tahapan pendekatan awal, tahap penerimaan, tahap bimbingan sosial dan keterampilan, tahap bimbingan lanjut, kemudian yang terakhir tahap resosialisasi.”</p> <p>2. M. Afif Galang Pekerja Sosial Penyelia Panti (Rabu, 22 Maret 2023 Pukul 14.30 WIB)</p> <p>“ Teknis dalam rehabilitasi di rumah singgah yang pertama itu ada yang namanya pendekatan awal. Nah, di pendekatan awal ini kami sebagai pekerja sosial panti melakukan observasi dan identifikasi mba untuk mendapatkan data diri PGOT tersebut. Kemudian yang kedua itu ada penerimaan, pada penerimaan kita assessment atau pengungkapan masalah ini untuk mendapatkan data masalah dari PGOT tersebut dan penempatan program pelayanan di panti. Lalu ada bimbingan sosial dan</p>
--	--	--------------	---	---

				<p>keterampilan mba, pada tahap ini mereka akan mendapatkan bimbingan seperti bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan kerja. Setelah bimbingan tersebut kemudian ada yang namanya bimbingan lanjut. Bimbingan lanjut ini berupa pemantauan dari panti dari pasca pengembalian mereka ke keluarga. Lalu yang terakhir itu ada resosialisasi mba.”</p>
--	--	--	--	--



Lampiran IV. Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Ibu Nina Min Lusiyanti



Wawancara dengan Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) Bapak Tri Argi Azari



Wawancara dengan Pekerja Sosial Penyelia Panti PGOT Bapak M. Afif Galang R

